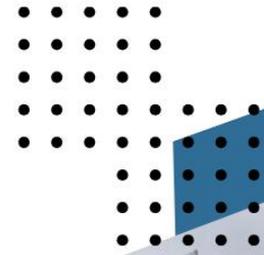




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
(DISKOMINFO-SP)**

KABUPATEN LUWU TIMUR

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 31 Januari 2025
Plt.Kepala Dinas,



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si,
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720114 200604 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum	4
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	29
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja	32
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Realisasi Anggaran	76
3.3. Pendapatan	80
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar tersebut, maka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis yang mengandung nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN (core value berAKHLAK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut terkait program-program kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

B. Dasar Hukum

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 78).

C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur

❖ Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam

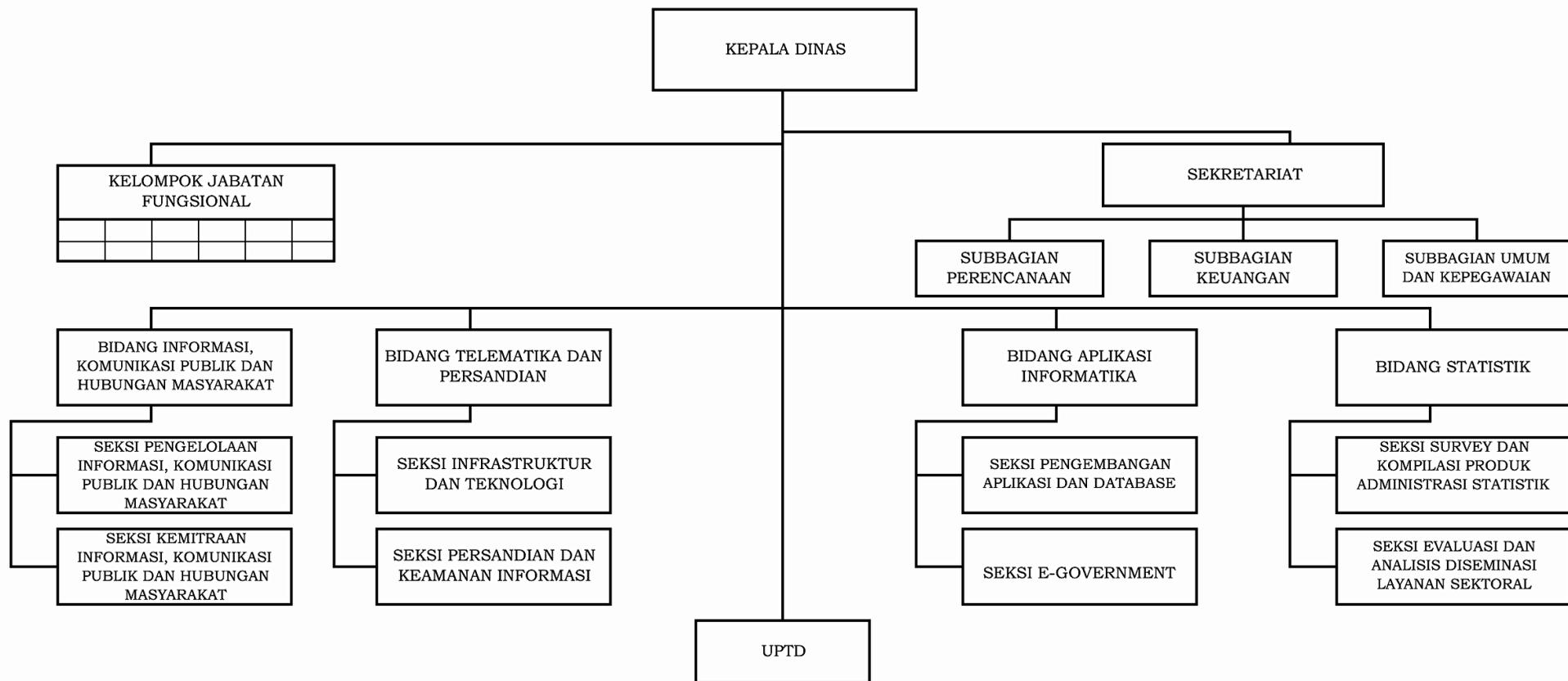
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

❖ Susunan dan Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) orang dengan perincian 25 (dua puluh lima) orang tenaga ASN dan 33 (tiga puluh tiga) orang tenaga Upah Jasa. Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai pada bulan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/D-IV		D3-D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV	4	1	2										6	1
2	III	1	1	5	3		2							6	6
3	IX			3										3	
4	II							1	2					1	2
5	I														
6	CPNS														
7	UPAH JASA			5	12		2	7	6		1			12	21
8	Jumlah	5	2	15	15		4	8	8		1			28	30

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Pejabat/Struktural Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/ D-IV		D3- D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	IX			3											3	
2	II.c								1							1
3	II.d							1	1						1	1
4	III.a			1											1	
5	III.c			1	1		1								1	2
6	III.b	1		1	2										2	2
7	III.d		1	2	1										2	2
8	IV.a	3	1	2											5	1
9	IV.c	1													1	
10	Jumlah	5	2	10	4		1	1	2						16	9

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
 - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
 - e. Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
 - c. kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang

- pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian

- **Tugas Pokok** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

- **Tugas Pokok** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- **Fungsi** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

- **Tugas Pokok** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, Instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerjanya.

RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan ,kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

tidak lain adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, VISI Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sbb :

“ Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya “

2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yang sejalan dengan salah satu misi Bupati Luwu Timur yakni :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik “.

2.1.3 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Target

Tujuan dan Sasaran Strategis serta target Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		ASUMSI CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
						2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	1.89	-	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	3.0
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	79	-	80	85	87	88	90	92	92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	Nilai	60.02	60.20	62	63	64	65	67	70	70

2.2 Perjanjian/ Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2024.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024.

Adapun Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.927.548.800,00
Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.290.470.920,00

Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	78,51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.759.860.885,00
--------------------------	-------------	-------	---	------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Akuntabilitas yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Sasaran guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Kota Yogyakarta

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala SKPD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Capaian Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persen (%)	Ket
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10	3,16	101%	
Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56	96,55	99%	Penilaian Tahun 2023
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	78,51	78,50	99%	Hasil Nilai Lakip Tahun 2023

1	<p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik</p>
----------	--

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Startegis 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,10	3,16	101
Persentase Capaian Rata-Rata					101

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dilakukan dengan 2 tahap yakni tahapan evaluasi mandiri dan juga tahapan evaluasi langsung (tanya jawab disertai bukti dukung). Dan hasil dari indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) adalah 3,16.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik									
Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,0	0,0	2,25	2,42	2,50	3,05	3,10	3,16	3,0

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Target tahun 2021 untuk indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah 2,0 namun Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun tersebut tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten luwu timur karena dokumen SPBE belum ada. Penilaian SPBE ini baru dilakukan pada tahun 2022 dimana Penilaian tersebut berjalan pada bulan agustus Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) di Makassar sudah berada pada tahap pengumuman. Adapun nilai nilai atau indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah 2,42 atau predikat Cukup, dimana target awal adalah 2,25. Selanjutnya pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mencapai peningkatan dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu mencapai 3,05 atau 122% dari tahun sebelumnya, jadi pada tabel untuk tahun 2024 peningkatan kinerja SPBE Kabupaten Luwu Timur masih terjadi peningkatan yang signifikan terhadap target sebelumnya yakni mencapai 3,10 dan terealisasi 3,16 atau Predikat Baik .

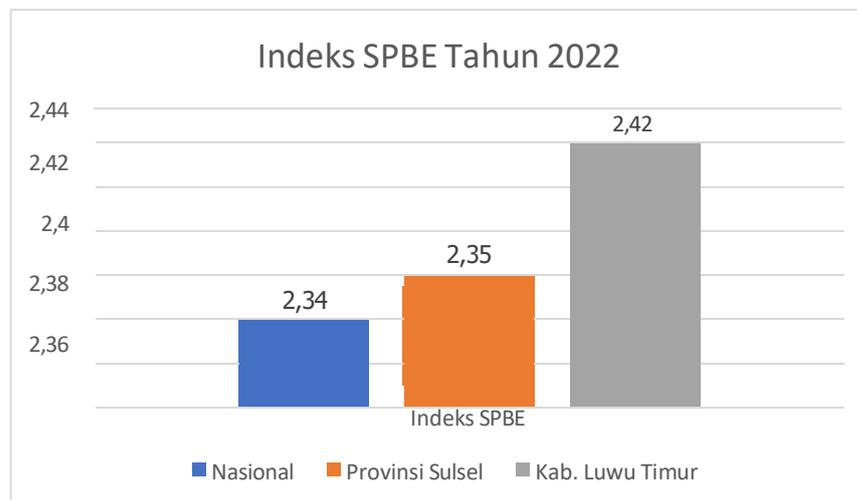
Adapun bebarapa indikator yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 6
Capaian OPD yang terkoneksi Internet 2024, Area publik, Puskesmas,BPP dan Rumah Jabatan

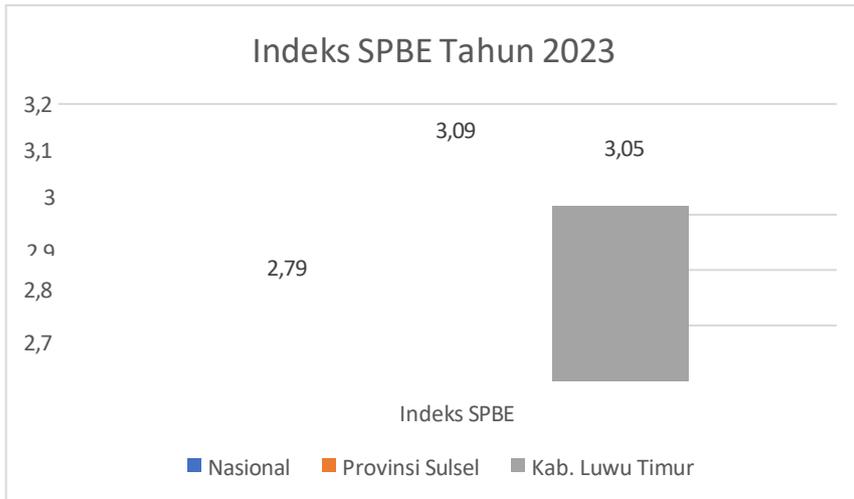
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2024
Jumlah OPD yang terakses internet	39 OPD	39 OPD	100%	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	41 OPD	100%	41 OPD	43 OPD	104%
Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet.	10 area publik	10 area publik	100%	21 area publik	21 area publik	100%	21 area publik	21 area publik	100%	20 area publik	20 area publik	100%
Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet.	-	-	-	11 puskesmas	11 puskesmas	100%	11 puskesmas	17 puskesmas	154%	15 puskesmas	15 puskesmas	100%
Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet.	-	-	-	9 BPP	9 BPP	100%	11 BPP	11 BPP	100%	11 BPP	11 BPP	100%
Jumlah Rumah Jabatan yang terlayani jaringan internet.	-	-	-	14 Rumah Jabatan	14 Rumah Jabatan	100%	16 Rumah Jabatan	16 Rumah Jabatan	100%	16 Rumah Jabatan	16 Rumah Jabatan	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 dalam aksesibilitas layanan internet hanya diperuntukkan untuk OPD dan area publik diwilayah kecamatan. Namun pada Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 aksesibilitas layanan internet mulai diperluas dan meminimalisir area blank tersebut. Hal ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama oleh pihak penyedia, dimana dalam hal ini Diskominfo-SP bekerja sama dengan pihak penyedia layanan Telekomunikasi atau PT. Telkom Indonesia untuk secara bersama-sama menyediakan akses jaringan internet tersebut.

Perbandingan capaian Kinerja antar Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2022-2023

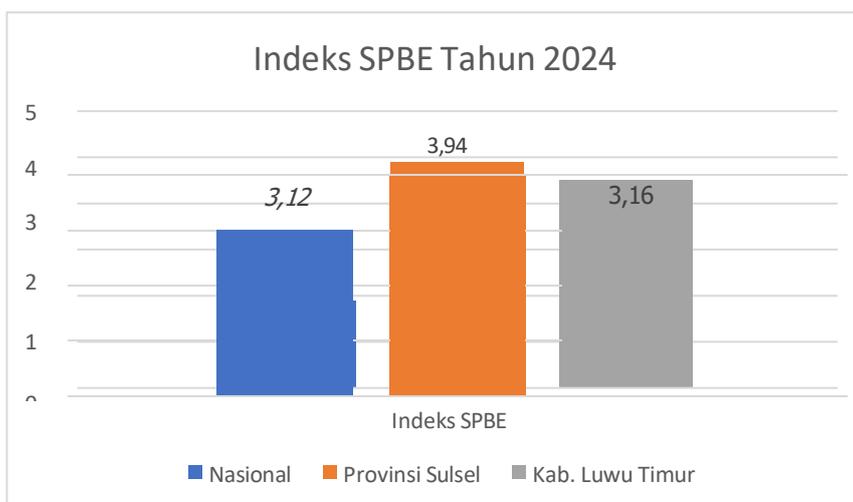


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kab. Luwu Timur mendapatkan nilai **2,42** (**CUKUP**) yang mana jika dibandingkan dengan capaian Indeks SPBE nasional dan provinsi sulawesi selatan, secara umum Kabupaten Luwu Timur masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi sulawesi selatan.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kab. Luwu Timur memperoleh nilai **3,05 (BAIK)** yang mana ini meningkat sebesar **0,63** dari tahun sebelumnya serta telah melampaui target IKU tahun 2023 yang ditetapkan pada renstra Dinas Kominfo-SP.

Untuk capaian nasional dan provinsi sulawesi selatan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian Indeks SPBE Kab. Luwu Timur tahun 2023 masih berada di atas rata-rata capaian Indeks SPBE Nasional.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kab. Luwu Timur memperoleh nilai **3,16 (BAIK)** yang mana ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 memperoleh nilai **3,94 (SANGAT BAIK)**. Secara umum capaian indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 masih di atas rata-rata capaian Indeks SPBE Nasional.

➤ **OPD yang terkoneksi Internet 2024**

Pada tahun 2024, 43 OPD telah Terkoneksi Internet atau persentase capaian kinerja mencapai angka 104%. Pencapaian ini memang sudah ditargetkan pada saat penyusunan rencana kerja dan masuk dalam skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun persentase Realisasi adalah 100% dari target 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebesar **100%** . Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet dibagi Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

Formulasi dengan hitungan $= (43/41 \times 100 = 104\%)$.

Adapun OPD yang terkoneksi internet tahun 2024 adalah :

✚ **43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi adalah :**

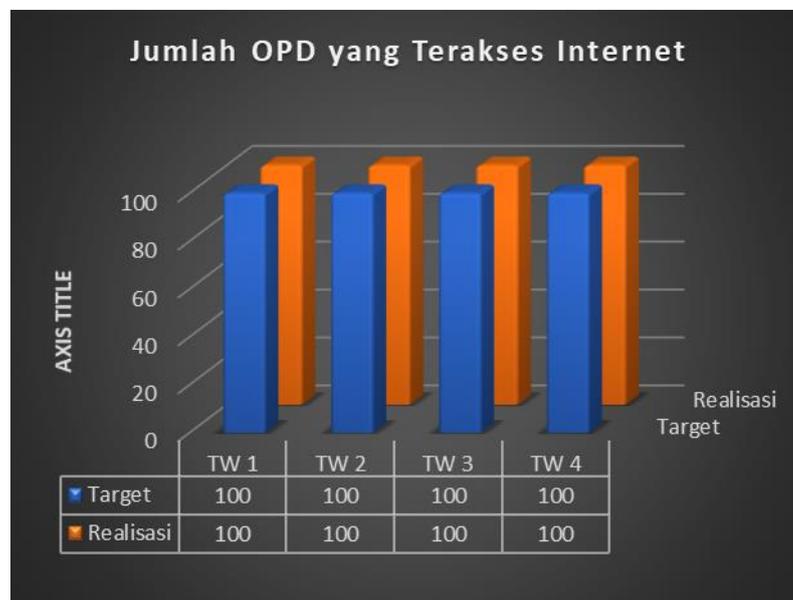
1. Sekretariat DPRD;
2. Sekretariat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD);
5. Dinas Kesehatan (DINKES);
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR);
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perikanan;

12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL).
14. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD);
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO-SP);
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA);
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Dinas Pemadam Kebakaran
30. Kantor Kecamatan Wotu;
31. Kantor Kecamatan Burau.
32. Kantor Kecamatan Tomoni.
33. Kantor Kecamatan Tomoni Timur.
34. Kantor Kecamatan Mangkutana.
35. Kantor Kecamatan Kalaena.
36. Kantor Kecamatan Angkona.
37. Kantor Kecamatan Malili.
38. Kantor Kecamatan Wasuponda.

- 39. Kantor Kecamatan Towuti.
- 40. Kantor Kecamatan Nuha.
- 41. Kelurahan Malili
- 42. Kelurahan Magani
- 43. Kelurahan Tomoni

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada seluruh OPD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 1 Jumlah OPD yang terakses internet



➤ **Lokasi area publik yang terlayani jaringan internet**

Pada Tahun 2024 jumlah Area Publik yang terkoneksi dengan jaringan internet Diskominfo-SP sebanyak 20 lokasi. Adapun 20 lokasi area publik yang telah terkoneksi jaringan internet Kominfo adalah Pujasera 1, Pujasera II, Landmark I, Landmark II, Gor Malili, Gedung Simpursiang, Masjid Babul Kheir, Masjid Haqqul Yakin, Masjid Agung Malili, Ruang Publik Kec. Burau, Ruang Publik Kec. Wotu, Ruang Publik Kec. Tomoni, Ruang Publik Kec. Tomoni Timur, Ruang Publik Kec. Mangkutana, Ruang Publik Kec. Malili, Ruang Publik Kec. Wasuponda,

Ruang Publik Kec. Towuti, R. Publik Kecamatan Kalaena Dan Ruang Publik Kec. Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 20 Area Publik pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 2 Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet tahun 2024



➤ **Puskesmas yang terlayani jaringan internet**

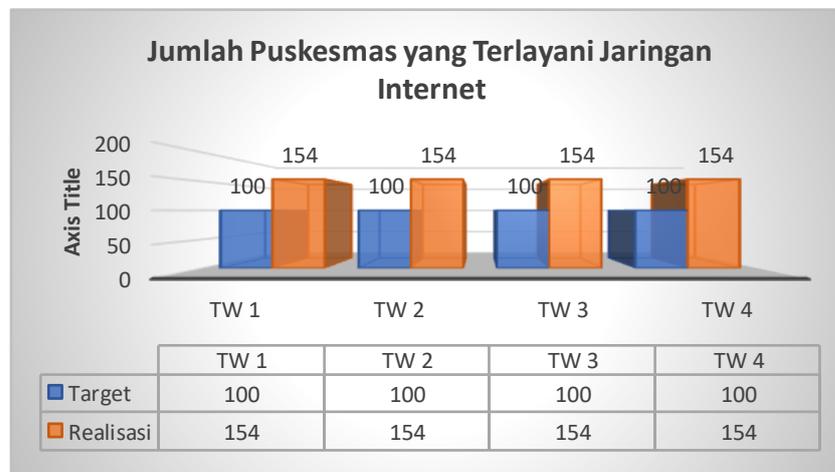
Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 15 Puskesmas Tahun 2024, ada beberapa strategi yang dilakukan seperti pengaturan jadwal dan pengaturan titik akses jaringan pada setiap puskesmas yang dilaksanakan pada triwulan I. hal ini dilakukan agar aktifitas pelayanan pada setiap puskesmas bisa berjalan lancar dengan adanya layanan internet dari Kominfo. Sehingga pada triwulan I dan II, III, dan IV jika ada terjadi permasalahan jaringan akan tetap dilakukan perbaikan rutin. Pada pemasangan akses jaringan internet pada 15 Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun target pemasangan akses internet pada puskesmas pada tahun 2024 tetap 15 Puskesmas. Adapun Puskesmas yang telah terkoneksi Internet Disominfo-SP pada tahun 2024 adalah:

1. PKM Wotu
2. PKM LAMPIA
3. PKM BONEPUTE
4. PKM Tomoni Timur

5. PKM Tomoni
6. PKM Mangkutana
7. PKM Kalaena
8. PKM Angkona
9. PKM Lakawali
10. PKM Burau
11. PKM Malili
12. PKM Wasuponda
13. PKM Towuti
14. PKM Timampu dan
15. PKM Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 15 Puskesmas pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 3
Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet Tahun 2024



pemasangan jaringan internet untuk 15 Puskesmas yang direncanakan pada Tahun 2024 telah dikerjakan selama satu tahun kegiatan, karena memang sudah menjadi kebutuhan oleh Puskesmas dalam menjalankan proses pelayanan administrasi perkantoran dan juga pelayanan bagi masyarakat. Namun pemasangan jaringan internet pada puskesmas Tahun 2024 dari target sebanyak 17 Puskesmas dan yang teralisasi sebanyak 15 Puskesmas dikarenakan akses dari

dua Puskesmas tersebut untuk saat ini belum dapat dijangkau jaringannya. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet dibagi Jumlah Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet Kominfo x 100%)”.

Formulasi dengan hitungan =(15/15 x 100= 100%).

➤ **BPP yang terkoneksi Internet**

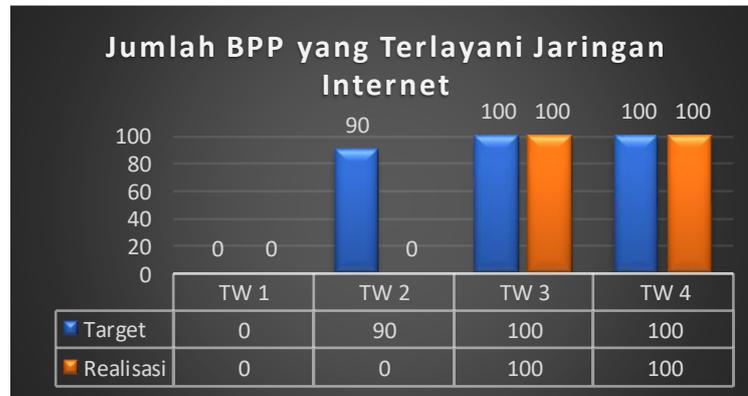
Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 11 BPP Tahun 2024, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebagai guna mengefisieni waktu dan juga anggaran. Untuk pemasangan jaringan pada 11 BPP yang ada di kabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga akses menuju BPP. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimasi waktu, anggaran yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

Pada tahun 2024 pemasangan akses jaringan internet pada BPP yang ada di Kabupaten Luwu Timur masih sama dengan tahun sebelumnya yang dimana pemasangan akses jaringan internet pada 11 BPP tahun 2024. Adapun 11 BPP yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2024 yakni:

1. BPP Burau
2. BPP Tomoni Timur
3. BPP Angkona
4. BPP Mangkutana
5. BPP Kalaena
6. BPP Malili
7. BPP Wasuponda
8. BPP Towuti
9. BPP Nuha
10. BPP Wotu dan
11. BPP Tomoni

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 11 BPP pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 4
Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet



➤ **Rumah jabatan yang terlayani internet**

Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 16 Rumah Jabatan Tahun 2024, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan karena pemasangan akses jaringan internet pada rumah jabatan tidak hanya yang berada pada wilayah ibu kota Kabupaten tapi diseluruh ibu kota kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk pemasangan jaringan pada 16 Rumah Jabatan yang ada di kabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga melihat ketersediaan infrastruktur jaringan yang mendukung pemasangan jaringan internet. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimiasi waktu yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

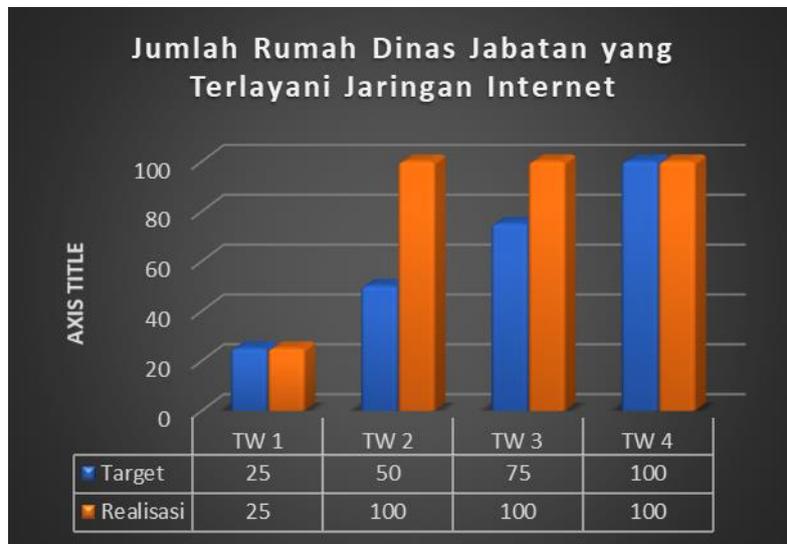
Adapun 16 Rumah Jabatan yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2024 yakni:

1. Rujab Bupati (Ruang Gubernur)
2. Rujab Wakil Bupati (Ruang Tengah)
3. Rujab Ketua DPRD (Ruang Depan)
4. Rujab Wakil Ketua DPRD I (Ruang Tengah)
5. Rujab Wakil Ketua DPRD II (Ruang Tengah)
6. Rujab Sekda (Ruang Tengah)

7. Rujab Camat Wotu
8. Rujab Camat Mangkutana
9. Rujab Camat Kalena
10. Rujab Camat Tomoni
11. Rujab Camat Tomoni Timur
12. Rujab Camat Angkona
13. Rujab Camat Malili
14. Rujab Camat Wasuponda
15. Rujab Camat Towuti dan
16. Rujab Camat Nuha

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 16 Rumah Jabatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 5
Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terlayani jaringan internet



Tabel. 7

Capaian Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2024
Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	4 aplikasi	16 aplikasi	400%	6 aplikasi	13 aplikasi	216,67%	8 aplikasi	10 aplikasi	125%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian aplikasi E-government yang dibangun dan dikembangkan semakin bertambah dengan banyaknya kebutuhan SKPD yang melaksanakan kegiatannya, dimana pada tahun 2021 target dan realisasi sesuai dengan yang ditetapkan namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 pembangunan dan pengembangannya melebihi target yang ditetapkan, begitupun untuk tahun 2024 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi juga masih tetap melebihi target. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pembuatan aplikasi. Tingginya permintaan pembuatan aplikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah dokumen SPBE yang telah ditetapkan sehingga mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah menggunakan aplikasi dalam proses pelayanan administrasi maupun pelayanan publik. Selain itu beberapa kemudahan yang didapatkan pada penggunaan aplikasi untuk pelayanan perkantoran juga banyak mempengaruhi setiap stakeholder di OPD untuk melakukan inovasi atau terobosan baru dalam peningkatan pelayanan publik. Salah satu contoh aplikasi yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara adalah aplikasi Si-Patuh, dimana tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan setiap ASN dalam hal ketepatan waktu kehadiran dan juga waktu pulang kantor. Selain itu pada aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada setiap ASN sesuai dengan tingkat kehadiran.

Adapun aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2024 yakni Aplikasi Database Inovasi, Aplikasi Pendataan Kebun Kelapa Sawit Rakyat, Pengembangan Remisi (Rekam Medis Terintegrasi), Aplikasi Kabupaten Sehat, Aplikasi Bank Surya Siap (Pengembangan Sumber Daya Aparatur Berbasis Aplikasi, LAPORMA (Layanan Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, LESTARI (Layanan Penertiban Surat Keterangan Terhadap Rumah Ibadah), Aplikasi Siaga Bencana (Sistem Informasi Penanggulangan Bencana), SIMAPADCECENG (Sinegritas Kolaborasi Manajemen Akun Belanja Daerah), BALUTTA (Belanja UMKM Terpadu).

Adapun perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 6
Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun



Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Triwulan IV tahun 2024 adalah 8 Aplikasi dan realisasi kinerja 10 Aplikasi, dengan persentase capaian kinerja sebesar 125%. Untuk Permohonan/permintaan pembangunan aplikasi di beberapa OPD untuk kegiatan administrasi kantor sangat tinggi mengingat asas kemanfaatan penggunaan teknologi dalam pelayanan sangat berpengaruh pada SDM dan peralatan sehingga menciptakan efektifitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.



Tabel. 8

Capaian Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak Tahun 2024

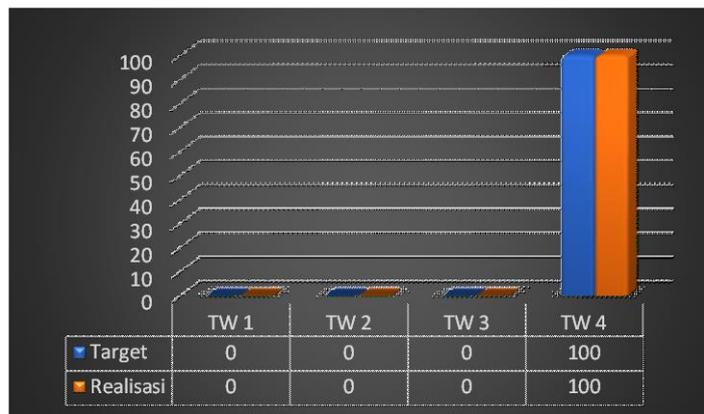
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2024
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak	260 buku	260 buku	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target dari indikator tersebut yang harus di capai pada tahun 2021 adalah 260 buku pembangunan Kabupaten dan terealisasi 260 buku pembangunan kabupaten dengan persentase capaian 100%. Jumlah Dokumen pembangunan kabupaten yang terpublikasikan sebanyak 260 buku tersebut dalam bentuk buku profil kabupaten dan kecamatan, dokumen data perkembangan perekonomian dan buku informasi perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan menghitung jumlah dokumen pembangunan daerah yang terpublikasi yaitu sebanyak 14 dokumen. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/dokumen yang valid yang berjumlah target 10 Dokumen yang dimana realisasi buku yang tercetak sebanyak 197 buku. Penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas KOMINFO-SP tapi melibatkan beberapa OPD sebagai produsen data dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur sebagai mitra pengelola data, sehingga diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di Daerah. Adapun lokus OPD yang ditargetkan menjadi pengguna data statistik daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah, Dinas KOMINFO-SP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Pada pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral yang melibatkan BPS Luwu Timur ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sumber daya manusia dibidang statistik dan juga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Sampai saat ini keterbatasan sumber daya manusia di bidang statistik, sangat sedikit dan mempengaruhi kinerja bidang sehingga berdampak pada minimnya kualitas pengumpulan data awal yang disusun, kemudian berakibat pada keterlambatan pengolahan data dan juga finalisasi data.

Oleh sebab itu, saat ini perhatian dari Pemerintah Daerah telah mengolakanasikan pengadaan tenaga ASN khususnya dibidang statistik.

Adapun perkembangan pengolahan data statistik daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 7.
Jumlah data statistik sektoral daerah yang yang diolah dan dicetak



Jika melihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan dan pencetakan data statistik daerah dilaksanakan pada trwiyulan IV. Adapun pengumpulan data statistik daerah dimulai pada triwulan II dengan maksud agar data yang dihimpun selalu update sesuai dengan kondisi yang terjadi di masing masing OPD. Sebagai upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data Kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. Penyusunan data Statistik Sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas KOMINFO-SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dengan menghasilkan dalam bentuk buku dan juga data pada website Pemda adalah Luwu Timur dalam Angka, PDRB Luwu Timur, Tingkat Kesejahteraan Luwu Timur, Statistik Daerah Luwu

Timur, dan Kecamatan Dalam Angka dan Aplikasi Satu Data Luwu Timur serta beberapa Data Statistic lainnya.

Tabel. 9

Capaian Jumlah Aplikasi yang diamankan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2024
Jumlah Aplikasi yang diamankan	26 aplikasi	26 aplikasi	100%	10 aplikasi	10 aplikasi	100%	10 aplikasi	10 aplikasi	100%	41 OPD	43 OPD	104%

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 46 aplikasi yang diamankan. Pada tahun 2024 berdasarkan hasil penjabaran dan penyalarsan rencana kerja untuk sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan indikator kinerja yang awalnya Jumlah aplikasi yang diamankan menjadi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Diskominfo-SP (2021-2026).

Tabel 14

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

<i>Sasaran I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik</i>				
Indikator Kinerja	Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10	3,16	3,0	101%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja sampai tahun 2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik antara lain :

- Tersedianya anggaran yang memadai untuk pengembangan aplikasi
- Meningkatkan pengamanan aplikasi yang telah dikembangkan

- Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengamanan jaringan
- Memaksimalkan Sarana dan prasarana yang ada
- Meningkatkan Kerjasama antar Organisasi perangkat daerah, puskesmas dan BPP dalam pelayanan koneksi jaringan internet.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan aplikasi
- Kurangnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan koordinasi yang baik dengan semua OPD dan unit kerja yang terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN 2024	
		(3)	(4)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.537.530.400,00		3.298.234.971,00	93,24
01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.712.509.900,00		2.515.534.525,00	92,74
	1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.776.000,00		38.769.100,00	74,88
	2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.660.733.900		2.476765.425,00	93,09
02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	825.020.500,00		782.700.446,00	94,87
	1 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	645.428.400,00		606.896.380,00	94,03
	2 Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	179.592.100,00		175.804.066,00	97,89
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	300.179.400,00		277.109.610,00	92,31
01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300.179.400,00		277.109610,00	92,31
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.271.000,00		37.618.220,00	74,83
	2 Membangun Metadata Statistik Sektoral	249.908,400,00		239.491.390,00	95,83
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.839.000,00		73.505.465,00	81,82
01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000,00		73.505.465,00	81,82
	1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000,00		73.505.465,00	81,82
TOTAL BELANJA		3.927.548.800,00		3.648.850.046,00	92,91

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp.3.927.548.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.648.850.046,00 atau dengan tingkat capaian 92,91 %.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat 3 (Tiga) program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	% Capaian kinerja	Keterangan
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah	100	100	100	Mencapai Target
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	41 OPD	43 OPD	104	Mencapai Target

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	90 titik	180 titik	200	Mencapai Target
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100	100	100	Mencapai Target
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	8 aplikasi	10 aplikasi	125	Mencapai Target
Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	11 Aplikasi	11 aplikasi	100	Mencapai Target
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100	100	100	Mencapai Target
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	197 Buku	197 Buku	100	Mencapai Target
Membangun metadata	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Mencapai Target
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang diamankan	41 Aplikasi	43 Aplikasi	104	Mencapai Target

2	Sasaran II Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
----------	--

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Startegis II

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	96,55	99%
Persentase Capaian Rata-Rata					99%

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “(Nilai akhir dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 masih menggunakan Nilai tahun 2023 yang dimana penilaian tahun 2024 Monev Keterbukaan Informasi tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi dengan adanya transisi anggota Komisioner Komisi Informasi dan untuk penilaian tahun 2024 dilaksanakan di tahun 2025.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran II : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik									
Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Renstra Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	89,18	85	93,84	87	96,55	96,56	96,55	92

Pada Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur mengikuti Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan dan telah meraih predikat “Menuju Informatif” dengan indeks keterbukaan informasi sebesar 89,18. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur telah sukses meraih penghargaan sebagai predikat “Kabupaten Informatif” dengan indeks keterbukaan informasi sebesar 93,84 (Tahun 2022) dan 96,55 (Tahun 2023), selanjutnya untuk tahun 2024 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan Komisi Informasi dengan adanya transisi anggota komisioner dan untuk penilaian tahun 2024 rencananya dilaksanakan tahun 2025.

Adapun indikator kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 11

Capaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang Terpublikasi

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2024
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	7.200 informasi	7.200 informasi	100%	8.600 informasi	8.600 informasi	100%	9.000 Informasi	13.031 Informasi	144%	9.300	14.789	159%

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Informasi yang dipublikasi dibagi Jumlah Total Informasi x 100%)”*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terpublikasi telah mencapai target bahkan di Tahun 2024 capaian melebihi dari target. Jika dilihat dari jumlah media yang menjadi support dalam Penyebarluasan Informasi Daerah pada Tahun 2024 terbilang banyak, mengingat target Informasi Daerah juga cukup besar cakupannya, sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas KOMINFO-SP menjalin kerjasama dengan Media Partner. Kerjasama ini dimaksudkan agar semua informasi Pemerintah Daerah dapat terpublikasi sampai pada masyarakat yang berada di luar wilayah Luwu Timur.

Pada Tahun 2024 Media Partner yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO - SP sebanyak 25 media partner , yakni :

1. PT. ASME KOMUNIKASI LUTIM (CYBER SULSEL)
2. PT. LUWU RAYA MEDIA KREATIF (LUWU RAYA)
3. PT. HASNI INTERMEDIA UTAMA (OKSON)
4. PT. CHANEL TIMUR MEDIA (CHANNEL PERS)
5. PT. SINYAL TAJAM INDONESIA (SINYAL TAJAM)
6. PT. DHIAR TECHNOLOGY INTERMEDIA (SARAMBANG)
7. PT. MENIT ENAM MEDIA (MENIT 6)
8. PT. AQIEL RIFF MEDIA (TIMUR ONLINE)
9. PT. LUTIM NEWS GRAMEDIA (LUTIM NEWS)
10. PT. ATHALAH KREASI MUDA (READ NEWS)
11. PT. ABYSSAL BERITA LUTIM (BERITA LUTIM)
12. PT. RAYYAN KABAR LUTIM (KABAR LUTIM)
13. PT. EKSPON DEMOKRASI MEDIA PRATAMA (EKSPON DEMOKRASI)
14. PT. MEDIA BATARA HANI TECH (BATARA POS)
15. PT. GEBY SAWERIGADING INTERMEDIA (INSPIRASI UPDATE NEWS)
16. PT. CYBER INTERMEDIA RAHMATQHAIREEN (POTO KLIK)
17. PT. MEDIA AZIZI UTAMA (SAOKAREBA)

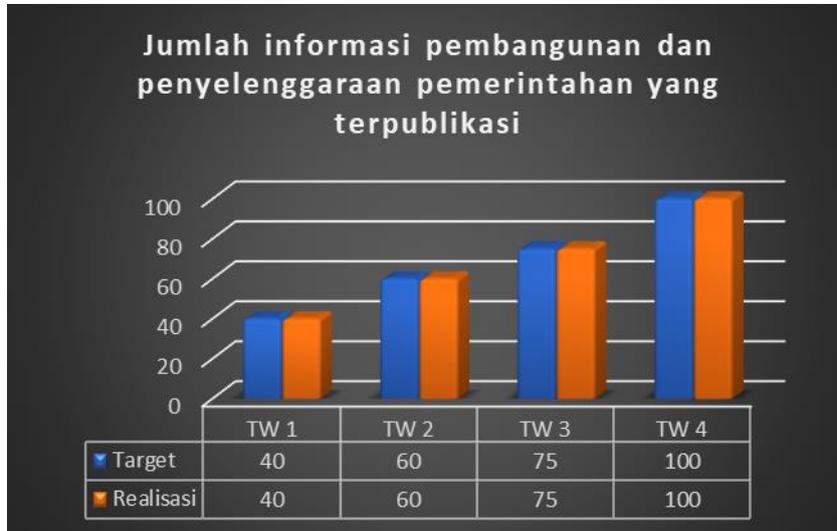
18. PT. MEDIA RADAR REPORTASE SATU BERITA (RADAR REPORTASE)
19. PT. TAPOJIE MEDIA INDONESIA (TAPOJIE)
20. PT. LUWU TIMUR MEDIATA (JURNALIS ONLINE.COM)
21. PT. INDI KREATIF MEDIA UTAMA (LUTIM ID)
22. PT. MEDIA EMPAT PUTRA LUTIM (CHANELTIMUR.COM)
23. PT. MEDIA PENA LUTIM (PENA LUTIM.COM)
24. PT. LUTIM TOP NEWS MEDIA (LUTIM TOP NEWS)
25. PT. CAHAYA LUTIM INTERMEDIA (LUTIM TERKINI)

Media Cetak yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO-SP sebanyak 8 yakni :

1. PT. PALOPO PRESS INTERMEDIA (PALOPO POS)
2. PT. WISNU ADITYA INTERMEDIA (SERUYA)
3. PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR (BERITA KOTA MAKASSAR)
4. PT. MEDIA FAJAR INDONESIA (FAJAR)
5. PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA (TRIBUN TIMUR)
6. PT. FAJAR UJUNGPANDANG INTERMEDIA (UJUNG PANDANG EXPRESS)
7. PT. RAKYAT SULAWESI SELATAN (RAKYAT SULSEL)
8. PT. MEDIA BATARA HANI TECH (BATARA POS)

Adapun perkembangan Jumlah informasi menuju Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terpublikasi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 9
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi



Selain itu dalam penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah juga dilakukan melalui saluran/Channel yaitu Media Sosial, Website Warta Lutim, PPID, SP4N Lapor dan Aplikasi Baruga.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, nilai monev Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 : **87,32 (menuju Informatif)** sedangkan Kabupaten Luwu Timur perolehan Nilai Monev Tahun 2022 : **93,84 (Informatif)**, jika dibandingkan dengan provinsi sulawesi selatan, secara umum Kabupaten Luwu Timur masih berada di atas rata-rata dari provinsi sulawesi selatan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, nilai monev Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 : **90,97 (Informatif)** sedangkan Kabupaten Luwu Timur perolehan Nilai Monev Tahun 2023 : **98,55 (Informatif)**, jika dibandingkan dengan provinsi sulawesi selatan, secara umum Kabupaten Luwu Timur masih berada di atas rata-rata dari provinsi sulawesi selatan dengan perbedaan **7,58 %**.

Untuk tahun 2024 monev Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada awal tahun 2025 dan proses penilaiannya sementara berjalan.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Diskominfo-SP (2021-2026)

Tabel 12

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik				
Indikator Kinerja	Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56	96,55	92	104%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja sampai tahun 2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik antara lain :

- Kurangnya SDM yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk memudahkan capaian kinerja

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban khususnya media partner yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.290.470.920,00	4.041.017.550,00	94,19
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.290.470.920,00	4.041.017.550,00	94,19
	1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	82.749.925,00	68.640.200,00	82,95
	2 Pelayanan Informasi Publik	149.480.250,00	81.009.932,00	54,19
	3 Layanan Hubungan Media	4.015.257.450	3.861.482.778	96,17
	4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	42.983.295,00	29.884.640,00	69,53
TOTAL BELANJA		4.290.470.920,00	4.041.017.550,00	94,19

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp.4.290.470.920,- dengan realisasi sebesar Rp.4.041.017.550,- atau dengan tingkat capaian 94,19 %.

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik yang diukur dengan indicator kinerja Persentase Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang dikelola. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2023	Realisasi Kinerja	% Capaian kinerja	Keterangan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100	100	100	Mencapai Target
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 saluran	5 saluran	100	Mencapai Target
Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 orang	166 orang	100	Mencapai Target
Layanan Hubungan Media	jumlah mass media yang menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	30 media	30 media	100	Mencapai Target
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk/dibina	71 kelompok	71 kelompok	100	Mencapai Target

3	Sasaran III Meningkatnya Nilai Sakip
----------	--

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis III ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran Startegis III

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	Nilai	78,51	78,50	99%
Persentase Capaian Rata-Rata					99%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran III : Meningkatkan Nilai Sakip									
Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Renstra Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Sakip	62	60,01	63	64,40	64	76,85	78,51	78,50	70

Pada tabel diatas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan. Ini dipicu oleh adanya kerjasama antar stockholder didalam lingkup Dinas Kominfo-SP yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Diskominfo-SP (2021-2026).

Pencapaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra pada tahun tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Sakip				
Indikator Kinerja	Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Nilai Sakip	78,51	78,50	70	109%

Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indikatif kinerja Nilai Lakip menggunakan rumusan $N - 1$ dimana dimasukkan adalah capaian Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan Nilai 78,50.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

- Mengoptimalkan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ dan sub kegiatan.
- Tersedianya dokumen perencanaan yang memadai
- Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada
- Memaksimalkan pengarsipan dokumen
- Meningkatkan kedisiplinan ASN

- Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang berupa pemenuhan dokumen

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

- Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor
- Penggunaan ruangan tidak maksimal karena bangunan gedung kantor masih kecil.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan yang mendukung pencapaian sasaran strategis III ini sebesar Rp **4.759.860.885,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp **4.334.879.848,-** atau 91,07% dari pagu anggaran. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini terjadi inefisiensi anggaran sebesar 8,93%.

6. Analisis Program dan Kegiatan Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Sakip yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator kinerja persentase penunjang perangkat daerah yang berjalan sesuai standar. Program ini direalisasikan melalui 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Untuk capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan, dapat dilihat pada table dibawah :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Keterangan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	Mencapai Target

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	100	Mencapai Target
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	100	Mencapai Target
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	Mencapai Target
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	10	10	100	Mencapai Target
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	22	22	100	Mencapai Target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	12	100	Mencapai Target
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	Mencapai Target
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Mencapai Target
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	%	100	100	100	Mencapai Target
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi	Menara	0	0	0	Mencapai Target
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 %	%	100	100	100	Mencapai Target
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	18	18	100	Mencapai Target

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	12	100	Mencapai Target
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	%	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	3	100	Mencapai Target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100	Mencapai Target
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100	Mencapai Target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	4	4	100	Mencapai Target
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang diadministrasikan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjuang yang terpenuhi	%	100	100	100	Mencapai Target
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Unit	4	4	100	Mencapai Target
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	3	3	100	Mencapai Target
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	18	18	100	Mencapai Target
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 %	%	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Unit	9	9	100	Mencapai Target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Unit	9	9	100	Mencapai Target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	Unit	2	2	100	Mencapai Target

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp **12.024.747.444,-** atau 92,66% dari total anggaran sebesar Rp **12.977.880.605,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.759.860.885	4.759.860.885	4.334.879.848	91,07	424.981.037	8,93	424.981.037	8,93
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.684.305	111.684.305	106.550.220	95,40	5.134085	4,60	5.134085	4,60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.239.450	48.239.450	47.957.600	99,42	281.850	0,58	281.850	0,58
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.450	3.214.450	3.112.450	96,83	102.000	3,17	102.000	3,17
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.364.450	3.364.450	3.014.520	89,60	349.930	10,40	349.930	10,40
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.865.955	56.865.955	52.465.650	92,26	4.400.305	7,74	4.400.305	7,74
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.081440.740	3.081440.740	2.980.514.130	96,72	100.926.610	3,28	100.926.610	3,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.976.009.740	2.976.009.740	2.905.038.250	97,62	70.971.490	2,38	70.971.490	2,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	105.431.000	105.431.000	75.475.880	71,59	29.955.120	28,41	29.955.120	28,41
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.196.240	27.196.240	24.082.490	88,55	3.113.750	11,45	3.113.750	11,45
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	27.196.240	27.196.240	24.082.490	88,55	3.113.750	11,45	3.113.750	11,45
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.394.650	190.394.650	74.003.998	38,87	116.390.652	61,13	116.390.652	61,13
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.414.650	41.414.650	30.607.850	73,91	10.806.800	26,09	10.806.800	26,09
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	148.980.000	148.980.000	43.396.148	29,13	105.583.852	70,87	105.583.852	70,87
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.679.950	485.679.950	460.258.476	94,77	25.421.474	5,23	25.421.474	5,23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.520.000	5.520.000	3.050.000	55,25	2.470.000	44,75	2.470.000	44,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.183.950	9.183.950	7.171.270	78,08	2.012.680	21,92	2.012.680	21,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.050.000	7.050.000	6.799.500	96,45	250.500	3,55	250.500	3,55
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	2.640.000	100,00	-	0,00	-	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.250.000	32.250.000	25.570.200	79,29	6.679.800	20,71	6.679.800	20,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.036.000	429.036.000	415.027.506	96,73	14.008.494	3,27	14.008.494	3,27
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.250.000	297.250.000	282.024.533	94,88	15.225.467	5,12	15.225.467	5,12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.650.000	5.650.000	4.314.750	76,37	1.335.250	23,63	1.335.250	23,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	105.600.000	709.783	86,85	13.890.217	13,15	13.890.217	13,15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	186.000.000	186.000.000	100,00	-	0,00	-	0,00
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.815.000	398.815.000	269.170.000	67,49	129.645.000	32,51	129.645.000	32,51
	Pengadaan Kendaraan dinas Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	111.270.000	111.270.000	111.270.000	100,00	-	0,00	-	0,00
	Pengadaan Mebel	16.000.000	16.000.000	4.500.000	28,13	11.500.000	71,88	11.500.000	71,88
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.000.000	270.000.000	153.400.000	56,81	116.600.000	43,19	116.600.000	43,19
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	1.545.000	1.545.000	-	0,00	1.545.000	100,00	1.545.000	100,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.400.000	167.400.000	138.276.001	82,60	29.123.999	17,40	29.123.999	17,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.380.000	66.380.000	50.686.001	76,36	15.693.999	23,64	15.693.999	23,64

	pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	81.020.000	81.020.000	67.605.000	83,44	13.415.000	16,56	13.415.000	16,56
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	20.000.000	19.985.000	99,93	15.000	0,08	15.000	0,08
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.290.470.920	4.290.470.920	4.041.017.550	94,19	249.453.370	5,81	249.453.370	5,81
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.290.470.920	4.290.470.920	4.041.017.550	94,19	249.453.370	5,81	249.453.370	5,81
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	82.749.925	82.749.925	68.640.200	82,95	14.109.725	17,05	14.109.725	17,05
	Pelayanan Informasi Publik	149.480.250	149.480.250	81.009.932	54,19	68.470.318	45,81	68.470.318	45,81
	Layanan Hubungan Media	4.015.257.450	4.015.257.450	3.861.482.778	96,17	153.774.672	3,83	153.774.672	3,83
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	42.983.295	42.983.295	29.884.640	69,53	13.098.655	30,47	13.098.655	30,47
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.537.530.400	3.537.530.400	3.298.234.971	93,24	239.295.429	6,76	239.295.429	6,76
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.712.509.900	2.712.509.900	2.515.534.525	92,74	196.975.375	7,26	196.975.375	7,26
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.776.000	51.776.000	38.769.100	74,88	13.006.900	25,12	13.006.900	25,12
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.660.733.900	2.660.733.900	2.476.765.425	93,09	183.968.475	6,91	183.968.475	6,91
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	825.020.500	825.020.500	782.700.446	94,87	42.320.054	5,13	42.320.054	5,13
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	645.428.400	645.428.400	606.896.380	94,03	38.532.020	5,97	38.532.020	5,97
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	179.592.100	179.592.100	175.804.066	97,89	3.788.034	2,11	3.788.034	2,11
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	300.179.400	300.179.400	277.109.610	92,31	23.069.790	7,69	23.069.790	7,69
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300.179.400	300.179.400	277.109.610	92,31	23.069.790	7,69	23.069.790	7,69
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.271.000	50.271.000	37.618.220	74,83	12.652.780	25,17	12.652.780	25,17
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	249.908.400	249.908.400	239.491.390	95,83	10.417.010	4,17	10.417.010	4,17
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.839.000	89.839.000	73.505.465	81,82	16.333.535	18,18	16.333.535	18,18



LAKIP 2024

1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	89.839.000	73.505.465	81,82	16.333.535	18,18	16.333.535	18,18
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.839.000	89.839.000	73.505.465	81,82	16.333.535	18,18	16.333.535	18,18
TOTAL BELANJA		12.977.880.605	12.977.880.605	12.024.747.444	92,66	953.133.161	7,34	953.133.161	7,34

C. Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan laporan yang memuat rencana kerja dan anggaran yang dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran serta didalamnya memuat Realisasi dari target dan Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0
Retribusi Daerah	0	0	0
Retribusi Jasa Umum	0	0	0
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	0	0	0

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Retribusi Jasa pemanfaatan Menara Telekomunikasi untuk Tahun 2024 dikembalikan ke Badan Pendapatan Daerah.

Tindak Lanjut atas LHE Tahun 2023

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2023 Nomor : 700.1.2/123/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, bersama ini dilampiran tindak lanjut sebagai berikut :

1. Keselarasan dokumen perencanaan RPJMD 2021-2026 diturunkan ke Renstra, IKU, Renja, RKA dan DPA telah tergambar dalam pohon kinerja serta keterkaitan dengan SKPD dan unit kerja telah dijelaskan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja
2. Penyusunan dokumen laporan kinerja telah mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2024
3. Perbandingan realisasi kinerjadengan realisasi kinerja di level nasional telah dijelaskan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Efisiensi atas penggunaan sumber daya telah dijelaskan pada setiap sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tolak ukur perencanaan, Penganggaran, Rencana strategis serta system akuntabilitas yang memadai.

LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public. Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan memberikan Kontribusi, Saran dan Kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Dengan diterbitkannya LAKIP ini menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kerjanya.

Malili, 31 Januari 2025

Plt . **Kepala Dinas,**



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

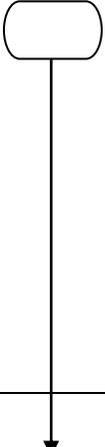
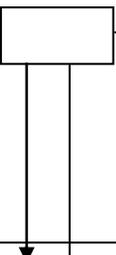
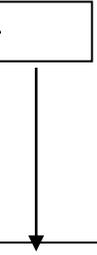
NIP. 19720114 200604 1 005

***L
A
M
P
I
R
A
N***

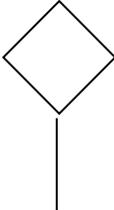
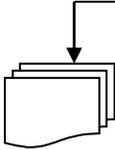
➤ SOP PENYUSUNAN LAKIP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN LUWU TIMUR

 <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT</p> <p>SUB BAGIAN PERENCANAAN</p>	Nomor SOP	1.08
	Tgl Pembuatan	13 Januari 2025
	Tgl Revisi	20 Januari 2025
	Tgl Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur</p>  <p><u>ALAMSYAH PERKESI, S.Hut., M.Si</u> Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c Nip : 19720114 200604 1 005</p>
	Nama SOP	PENYUSUNAN LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami kegiatan yang akan dibuatkan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD 3. Mengetahui format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Surat Biasa, Surat Undangan 2. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 3. SOP Pembuatan Nota Dinas 4. SOP Pengarsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Keterlambatan penyusunan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD akan menghambat pelaksanaan kegiatan dinas 	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Staf Bagian	Kepala Seksi	Sub Bag Perencana dan Program	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima Surat Masuk dari Bappeda							Surat Masuk	2 Hari	Surat masuk yang telah didisposisi	Surat masuk permintaan Laporan setelah didisposisi Kadis, diteruskan ke Bag. Perencanaan
2.	Membuat dan Mengetik Lakip, RKA-DPA, RENSTRA SKPD dalam							Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD	3 Hari	Laporan terketik dalam format	Staf Bagian yang mengetik dalam format laporan

	format									
3.	Mengoreksi Laporan						Laporan hasil ketikan	1 Hari	Laporan hasil koreksi	Kasubbag. Perencanaan dan Program mengoreksi dan memaraf laporan
4.	Memaraf surat						Laporan hasil koreksi dari kasubag. Perencanaan	30 Menit	Laporan hasil koreksi	Kasubbag. Perencana membawa Laporan ke Kadis untuk ditandatangani

5.	Menandatangani Laporan							Laporan telah diparaf oleh Sekdin	30 Menit	Laporan telah ditandatangani Kadis	Laporan digandakan dan dikirim
6.	Penggandaan Laporan							Laporan siap dikirim	5 menit	Laporan yang sudah ditandatangani Kadis	Laporan dikirim

➤ **Rapat Evaluasi RKPD Dinas Kominfo Tahun 2024**

